

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian tentang konstruksi sosial terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemic memiliki dua simpulan yang akan dijelaskan secara umum dan khusus. Pada simpulan umum hasil penelitian akan dideskripsikan secara umum dan tidak dikategorisasikan. Sedangkan pada simpulan khusus akan di deskripsikan hasil penelitiannya sesuai kategori yang berdasar pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tentu simpulan yang akan dideskripsikan agar bersifat representative.

5.1.1 Simpulan Umum

Pelaksanaan Pilkada di masa pandemic merupakan sebuah anomaly yang ditunjukkan oleh realitas yang dikonstruksi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pertama bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemic merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat dalam memenuhi haknya dan juga bagaimana pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di tengah kondisi pandemic covid ini. Kedua, keterlibatan media social masih perlu adanya stimulus pendekatan etika digital yang baik bagi masyarakat dalam memanfaatkan media sosialnya. Dan konstruksi pada berita di media social akan selalu menunjukkan adanya distorsi antara berita yang ada dengan gagasan masyarakat sebagai realitas objektif yang ada.

Posisi media sosial tentunya menjadi ruang digital bagi warga tasikmalaya dalam mengkonstruksi realitas sosialnya yang tampak dan tanpa diisadari menjadi komunitas masyarakat (*community civics*) karena telah menunjukkan adanya proses kolaborasi antara orang-orang atau pengguna media sosial juga berdasarkan kesamaan minat, situasi dan kepentingan. Selanjutnya posisi Pendidikan kewarganegaraan dalam keterlibatan media sosial sebagai sarana diskursus warga negara merupakan Pendidikan demokrasi yang dapat dipahami bersama bahwa adanya hak kebebasan yang dimiliki setiap orang. Media sebagai ruang demoktasi dan menjadi wahana gagasan diantara warga negara dapat menghasilkan sebua konsesus dan kesepakatan kelompok sebagai hasil transformasi gagasan individu yang disatukan

5.1.2 Simpulan Khusus

- 1) Konstruksi sosial atas pelaksanaan Pilkada di masa pandemic ini yaitu Warga Tasikmalaya dalam hal ini sudah mulai memahami tujuan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemic (*the purpose of government*), dan sudah berani memberikan masukan bahkan kritik sebagai wujud demokrasi dan hak nya sebagai warga bebas (*individual rights*), dan menunjukkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam berpartisipasi aktif (*responsibility of citizenship*). Ketiga factor di atas merupakan sikap nyata dari adanya keterampilan warga negara (*civics skill*) terutama dalam hal menggunakan pemikirannya secara kritis (*critical thinking skills*).
- 2) Keterlibatan media sosial sebagai sarana diskursus warga Tasikmlaya berperan kuat dalam meningkatkan diskusi-diskusi aktif bagi masyarakat pengguna internet. Diskusi-diskusi tersebut banyak terjadi pada platform facebook dan Instagram yang sering menampilkan aksi kesepahaman yang kolektif yang akhirnya mengerucut menjadi sebuah aksi dukungan bahkan menentang terhadap sebuah kebijakan. Demikian, media sosial saat ini memiliki posisi sebagai alat control kebijakan yang sangat produktif. Ruang publik yang tercipta dapat menjadi arena dimana banyak hadirnya masyarakat untuk melakukan diskusi. Oleh kerana itu hal ini dapat memunculkan aksi kolektif, membangun pola pikir yang dewasa, ruang demokrasi digital, dan dapat dijadikan juga sebagai tempat yang bisa menemukan kebebasan untuk berekspresi tanpa batas ruang dan waktu. Posisi Pendidikan kewarganegaraan dalam keterlibatan media sosial sebagai sarana diskursus warga negara merupakan Pendidikan demokrasi yang dapat dipahami bersama bahwa adanya hak kebebasan yang dimiliki setiap orang. Media sebagai ruang demoktasi dan menjadi wahana gagasan diantara warga negara dapat menghasilkan sebua konsesus dan kesepakatan kelompok sebagai hasil transformasi gagasan individu yang disatukan. Sikap dan tindakan seorang warga negara yang demokratis didukung pula oleh kompetensi kewarganegaraan, yaitu civic disposition. Civic disposition yang merupakan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama dalam demokrasi memiliki peran

yang penting sebagai aspek pendukung partisipasi politik. Civic disposition perlu dimiliki oleh seseorang warga negara agar menjadi cerdas, berkarakter, dan partisipasi

- 3) implikasi dari adanya konstruksi sosial yang dibangun warga Tasikmalaya yaitu bagaimana kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemic dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, dilihat dari aspek kesehatan dengan adanya sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan penyelenggara melalui media, tokoh masyarakat, sebagai usaha perlindungan keamanan dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam tahapan Pilkada di masa pandemic. Kemudian dilihat dari aspek politik bahwa stabilitas politik yang terjadi saat pandemic dapat menjadikan actor politik termasuk kandidat calon, dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat bersedia menerima berbagai keterbatasan waktu dan tempat, seperti pelaksanaan kampanye yang semula dilakukan secara konvensional menjadi kampanye terbatas yang dapat dihadiri oleh beberapa orang saja, atau bisa melalui pemanfaatan media digital menjadi kampanye online. Kemudian aspek hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 menjadi upaya pemerintah dalam mengatur segala tahapan pelaksanaan Pilkada agar sesuai dengan situasi dan kondisi saat Pandemic Covid-19. Kemudian aspek ekonomi yaitu adanya kekhawatiran masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya menjadikan sector ekonomi sebagai penguat stabilnya suatu daerah. Dampak lain dari sector ekonomi yaitu kehilangan pekerjaan, dan beberapa harga pangan meningkat. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang memulihkan sector ekonomi melalui berbagai bidang seperti pariwisata dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dalam menjalankan kehidupannya di masa pandemic. Implikasi yang terjadi selanjutnya partisipasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan juga terjadi dalam kajian civics community.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian tentang konstruksi sosial warga Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemic tentu memiliki implikasi penelitian, dimana hal ini merealisasikan apa yang menjadi novelty yaitu mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam praktik di masyarakat dan pemerintahan dalam mengembangkan pemikiran dan sudut pandang pada dinamika politik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, dan hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan di dalam dimensi sosio-kultural dan kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat dipengaruhi oleh media sosial sebagai ruang publik di era digital, dimana setiap warga dapat mengkontruksi realitas sosial dengan bebas. Temuan ini berimplikasi pada konsep kewarganegaraan digital dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan yang dikenbangkan sebagaimana membangun nilai-nilai keadaban pada masyarakat digital atau modern.
- 2) Arus informasi di media sosial yang sangat cepat diakses menjadi efektif dalam membangun gerakan kolektif masyarakat, maka media sosial dijadikan media kampanye, ataupun sosialisasi tentang Pilkada di masa pandemic. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiokultural.
- 3) Keterlibatan media sosial sebagai sarana diskursus warga Tasikmalaya juga memberikan ruang komunikasi antar warga, hal ini selaras dengan *grand theory* yang digunakan yaitu Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckmann dimana konstruksi sosial yang berlangsung lamban dapat didukung dengan theory Konstruksi Sosial Media Massa yang dikembangkan Bungin, dengan media sebagai ruang digital dapat kosntruksi oleh masyarakat, dan temuan ini berimplikasi pada keterlibatan media sosial dalam konsep demokrasi deliberative yang dikemukakan Habernas, dan hal ini berlangsung di era digital.
- 4) Kehidupan masyarakat yang demokratis, teknologi dan informasi memberikan ruang bagi warga negara dalam berinteraksi dalam

memberikan gagasan, pandangan, ide, sebagai komunikasi dua arah yang dapat mempengaruhi dan disitu terdapat pola komunikasi yang terlihat sebagai bentuk konstruksi sosial. Temuan ini berimplikasi pada praktis diskursus warga yang diperlukan dalam mengembangkan warga negara dalam kehidupan demokratis.

- 5) Implikasi selanjutnya KPU melakukan disaster manajemen dengan terus mensosialisasikan protocol kesehatan melalui pendekatan perilaku dan menggunakan norma subjektif sebagai control dari lingkungan masyarakat dan keluarga dalam mendukung pada protocol kesehatan untuk turut mensukseskan dilaksanakannya Pilkada di masa Pandemic.
- 6) Penelitian ini juga berimplikasi pada norma subjektif yang terjadi di lingkungan masyarakat, adanya pengaruh dari orang lain yang dapat meningkatkan Self-efficacy atas apa yang dilakukannya. Dengan banyaknya yang mensosialisasikan dan mengikuti protocol kesehatan maka semakin banyak masyarakat yang terbangun untuk sama-sama menerapkannya untuk mengurangi terpaparnya covid-19.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian yang telah peneliti lakukan akan mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, praktisi Pendidikan kewarganegaraan, dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah

a) Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat merespon dengan cepat dan tepat dalam menyikapi banyaknya berita hoaks yang tersebar di media sosial melalui regulasi atau peraturan tentang etika bermedia sosial. Hal ini juga bermanfaat sebagai edukasi bagi pewarta juga warga pengguna media sosial. Kemudian pemerintah perlu membuat program dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media sosial sehingga mampu memiliki keterampilan warga negara yang baik dengan sikap cerdas dalam memilih informasi pada media sosial, hal ini dapat melalui literasi media.

b) Komisi Pemilihan Umum

Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi landasan bagi KPU dalam menciptakan iklim politik yang baik selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas walaupun Pilkada dilaksanakan di tengah Pandemic. Dengan Perppu tersebut, KPU dapat menyesuaikan lima tahapan (verifikasi bakal calon, pendataan pemilih, kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara) Pilkada yang mengacu kepada protocol kesehatan, Rekomendasi selanjutnya KPU dapat berkoordinasi dengan pemerintahan Kab Tasikmalaya guna memastikan setiap daerah memiliki tingkat keamanan yang baik dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada ini. Kemudian dilihat dari aspek kesehatan, keselamatan publik dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan KPU dalam melakukan kegiatan pada tahapan yang ada.

c) Badan Pengawas Pemilu

Pelaksanaan tahapan Pilkada tidak sebegitu berjalannya dengan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, terutama dalam pelanggaran protocol kesehatan. Kegiatan ini memerlukan pengawasan langsung dari Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang dalam mengawasi kegiatan Pilkada. Hal ini maka bawaslu dapat memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar dan memberikan peringatan. Rekomendasi selanjutnya Bawaslu dapat menjalankan pengawasannya bukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang melanggar pada ketentuan Pilkadam tetapi dapat menjalankan pengawasan yang terjadi pada media massa. Dengan ini diharapkan pengawasan ini dapat menyentuh semua kegiatan yang melanggar dengan baik dan tidak hanya menjadi formalitas belaka.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

a) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Program studi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menciptakan lulusan terbaik untuk mewujudkan kompetensi warga negara di lingkungan Pendidikan. Sebagai pusat pengembang dan penghasil pendidik kewarganegaraan yang memiliki rasa tanggungjawab warga

negara, mampu melakukan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi kepada praktik-praktik kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat memberikan bekal bagi lulusan yang tidak hanya menguasai civics knowledge dan civics skill, tetapi menguasai juga civics disposition dimana karakter kewarganegaraan ini merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik yang baik.

b) Dosen Pendidikan Kewarganegaraan

Pada dasarnya dosen memiliki peran penting dalam merealisasikan pembelajaran yang berkualitas dan demokratis. Disini, tentunya dosen perlu menjamin bahwa konsep Pendidikan kewarganegaraan dapat berfokus kepada mempersiapkan mahasiswa untuk menelaah suatu hal yang problematic yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Walau dalam kegiatan perkuliahan dosen berfokus pada kompetensi mahasiswa sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak menghilangkan peran dosen dalam membantu mahasiswa untuk mencapai orientasi pembelajarannya dan terus meningkatkan kemampuannya. Terlebih seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi informasi, dosen perlu menjadi motivasi mahasiswa menjadi berkualitas, partisipatif, serta kritis. Maka program studi Pendidikan Kewarganegaraan dapat memfokuskan kepada bahan kuliah yang dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal ini dapat difokuskan kepada kajian-kajian demokrasi digital, dan kajian teknologi IT.

c) Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai subjek utama dalam mempersiapkan pendidik pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan formal dan informal. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi pendorong terciptanya mahasiswa yang siap mewujudkan kompetensi warga negara di lingkungan masyarakat. Mampu meningkatkan sikap demokratis untuk mengabdikan pada masyarakat, bahkan memecahkan persoalan yang eksis di lingkungan sosial. Terlebih mahasiswa perlu merealisasikan pembelajarannya di lingkungan pendidikan dan di lingkungan masyarakat, dan mahasiswa juga perlu

melibatkan dirinya pada kehidupan sosial politik yang dinamis sehingga mampu memberikan sumbangsih pendidikan kewarganegaraan terhadap kehidupan sosialnya.

d) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah dapat di memberikan pengetahuan yang kontekstual yaitu memberikan jawaban atas permasalahan kehidupan berwarga negara saat ini. Mata kuliah ini dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk kajian keilmuan yang mampu memandang pendidikan politik dan hukum menjadi pengetahuan yang penting yang kemudian memberikan bekal kemampuan berpikir kritis terhadap setiap permasalahan negara ini. Jika selama ini Pendidikan kewarganegaraan focus kepada pengembangan keilmuannya saja, dalam konteks ini perlu bertransformasi kepada sebuah paradigma bahwa warga negara bukan hanya siswa atau mahasiswa yang sedang menimba ilmu di kelas, namun termasuk masyarakat diluar lingkungan Pendidikan formal yang justru memiliki peran yang kompleks di dalamnya. Maka dengan itu, pengembangan keilmuannya dapat lebih disalurkan agar lebih komprehensif dan mencakup semua lapisan masyarakat..

3. Masyarakat

a) Tokoh Agama

Pada dasarnya tokoh agama merupakan bagian penting dari lapisan masyarakat, karena tokoh agama ini dapat dinilai menjadi perantara pemerintah dan masyarakat dalam mensosialisasikan penerapan protocol kesehatan Pilkada di masa Pandemic. Selama kegiatan pilkada, tokoh agama dinilai mampu menampung aspirasi masyarakat karena dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU yaitu selalu melakukan kegiatan yang dihadiri beberapa tokoh penting dari masyarakat terutama tokoh agama. Dan posisi tokoh agama juga menjadi salah satu aktor penting dalam pemilu yang bisa dimaksimalkan untuk mengajak semua pihak melakukan hal positif dalam kegiatan Pilkada di masa pandemic, dan juga menjadi harapan masyarakat saat kegiatan kampanye dan rapat umum ini menjadi salah satu sarana transaksi gagasan, transaksi ide, dan menjadi referensi pemilih.

b) Pegiat Media Sosial

Media sosial sebagai pendorong terciptanya ruang publik sebagai wujud demokrasi memerlukan perhatian dari penggunanya dengan dibangunnya strategi Pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan diluar Pendidikan formal. Ancaman terbesar pada media sosial yaitu penyebaran berita hoaks, maka diperlukannya pemahaman pegiat media sosial untuk turut meminimalisir tersebarnya berita hoaks tersebut. Masyarakat sebagai pegiat media sosial mampu memiliki kesadaran literasi yang baik sehingga menjadi salah satu pendukung terlaksananya kegiatan Pilkada di masa pandemic. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang direalisasikan di luar pendidikan formal mampu menciptakan keterampilan warga negara dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik.

4. Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih sebatas pada keterlibatan dan fungsi media sebagai ruang publik digital, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai model komunikasi bagaimana antar warga menggunakan media sosialnya. kemudian dapat dilakukan juga kajian model Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun nilai-nilai keadaban warga negara (civics virtues) seiring pesatnya transformasi teknologi dan informasi yang berlangsung pada media. selain itu, penelitian ini masih sebatas posisi dan kekuatan media sosial dalam mengkonstruksi atas realitas sosial. Maka, kedepannya perlu juga dilakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai rekonstruksi Pilkada bukan sebagai pembenaran demokrasi tetapi menemukan kelemahannya dan memperbaikinya sebagai tanggungjawab warga negara sehingga kebermanfaatan penelitian ini dapat dilihat dari sisi idealis dan pragmatis yang dapat mengantarkan peneliti kepada tahap berikutnya.